

## EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) DALAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DI KELURAHAN KURAO PAGANG KOTA PADANG

Asdaliani<sup>1</sup>

[asdaliani14@gmail.com](mailto:asdaliani14@gmail.com)

Nora Eka Putri, S.IP., M.Si<sup>2</sup>

[noraekaputri@fis.unp.ac.id](mailto:noraekaputri@fis.unp.ac.id)

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

### Abstract

*This study discusses the Evaluation of the Program for Increasing the Role of Women Towards Healthy and Prosperous Families (P2WKSS) in the Development of Prosperous Families in Kurao Pagang Sub-District, Nanggalo District, Padang City which aims to create a healthy and prosperous family. The method used in this study is descriptive qualitative. This research was conducted at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning Control, and especially in RW 08, Kurao Pagang Village. Furthermore, the selection of research informants was done by incidental sampling and purposive sampling. Based on incidental sampling techniques, some of the assisted residents in 75 families that researchers met by chance were in the research field, while in purposive sampling, the government had the authority and responsibility for implementing the P2WKSS Program. Data collected by means of interviews, observation, and documentation studies. The research findings that researchers can in the field about the P2WKSS Program start from the implementation, the factors that influence the success of the program implementation, and the government's efforts to overcome the factors that influence the failure. Based on the research, it was found that (1) the P2WKSS program in the Kurao Pagang Sub-district has brought improvements to the region but has not brought increased income for the target people, (2) there are problems with resource factors, (3) preventive efforts and promotive efforts by the government in the implementation of the P2WKSS Program.*

**Keywords:** *Evaluation, P2WKSS Program, Assisted Citizen*

## PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan selalu menyertai proses pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi problem besar yang harus diselesaikan. Masalah kemiskinan ini dapat diupayakan melalui pembangunan nasional bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional tersebut merupakan serangkaian proses perubahan yang diupayakan pemerintah bersama seluruh warga atau masyarakat dengan mengharapkan terwujudnya masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan nasional yang dimaksud mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dilakukan saat ini yaitu dengan adanya pemberdayaan perempuan.

Resminya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita Ny. Lasijah Soetanto pada tahun 1978, merupakan cikal bakal dari terbentuknya pemberdayaan perempuan. Perkembangan pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah terus direalisasikan melalui berbagai kebijakan dan strategi. Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu adanya Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). ([www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id))

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) adalah program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kedudukan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dimulai dari lingkungan keluarga untuk

mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai penggerakannya.

Sasaran dari Program P2WKSS yang terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Daerah adalah keluarga miskin di desa/ kelurahan dengan perempuan sebagai penggerak utama. Sedangkan pelaksanaan P2WKSS bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

Implementasi Program P2WKSS dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang yang sudah ada sejak tahun 2008. Program ini sudah di terapkan binaan P2WKSS di kelurahan-kelurahan yang dipergilirkan yang hanya berlaku 1 tahun namun pada Kelurahan Kuro Pagang secara istimewa mendapat pembinaan lanjutan sampai 3 tahun. Hal ini ditetapkan karena 1 tahun penerapan program dirasa kurang maksimal.

Kelurahan Kuro Pagang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Nanggalo. Implementasi Program P2WKSS di Kelurahan Kuro Pagang sudah diterapkan sejak Januari 2017, tepatnya di RT 01 dan RT 02 RW 08. Pemilihan Kelurahan Kuro Pagang sebagai daerah pembinaan keluarga melalui program P2WKSS yaitu sesuai kriteria suatu kelurahan yang masih terbelakang atau tertinggal secara fisik yaitu sarana prasarana serta dari sumberdaya manusia yang masih rendah. Adapun cara untuk membantu perkembangan kehidupan masyarakat di kelurahan Kuro Pagang yaitu dengan mengikutsertakan semua OPD pemerintahan Kota Padang untuk melakukan program

Asdaliani, Nora Eka Putri, SJP, M. Si | 126

kegiatannya dalam membenahi ketertinggalan di Kelurahan Kurao Pagang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan melalui penyuluhan-penyuluhan. Bentuk binaan yang telah diterapkan oleh Program P2WKSS ini diantaranya yaitu pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pelatihan pembuatan kerajinan tangan, dan penyuluhan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berhasil atau tidaknya Program P2WKSS dilaksanakan di Kelurahan Kurao Pagang.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 1. Konsep Evaluasi

#### a. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya formulasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang, dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.. Kebijakan publik yang tidak tercapai sesuai dengan tujuan karena mengalami resistensi, maka hal ini akan menjadi salah satu mengapa suatu kebijakan perlu dievaluasi, apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang harus diambil, apakah kebijakan itu harus dihentikan, dilakukan terminasi atau melaksanakan reformulasi untuk mendapatkan kebijakan baru (Muhiddin, 2017).

Sementara itu Riyadi dalam (Deddy, 2016) menjelaskan bahwa evaluasi dapat dilakukan pada seluruh periode kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Saat evaluasi yang dilakukan belum berjalan/ beroperasi pada tahap

perencanaan yang disebut juga dengan pra evaluasi.

- 2) Saat program tengah berjalan
- 3) Saat program selesai atau berakhir yang disebut juga dengan ex post evaluation.

#### b. Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn dalam (Deddy, 2016) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi, yaitu :

- 1) Efektifitas, yaitu berkenaan dengan pencapaian tujuan dari adanya suatu kegiatan.
- 2) Efisiensi, yaitu berkenaan dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
- 3) Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kegiatan dapat mengatasi suatu masalah dari maksud di adakannya kegiatan.
- 4) Kesamaan, yaitu berkenaan dengan sejalanannya aturan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.
- 5) Ketanggapan, yaitu berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan dapat menjadi jawaban dari adanya suatu masalah.
- 6) Ketepatangunaan, yaitu berkenaan dengan manfaat yang dirasakan oleh sekelompok orang dari suatu kegiatan.

### 2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program

George C. Edwards III dalam (Arifin, 2015) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

#### a. Faktor Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting yang berfungsi sebagai arah dalam melaksanakan suatu kegiatan. Instruksi yang di berikan dari atasan kepada pelaksana kebijakan haruslah jelas, tepat dan konsisten.

b. Faktor Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Selain kapabilitas atau kemampuan pelaksana kebijakan juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dengan kata lain sikap lah yang mempengaruhi cara pandang pelaksana kebijakan tersebut dengan melihat dampaknya terhadap kepentingan perorangan maupun organisasi. Artinya pelaksana kebijakan memiliki perilaku-prilaku yang juga mempengaruhi suatu efektifitas pelaksanaan kebijakan.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi erat kaitannya dengan pelaksanaan suatu kegiatan didasarkan standar operasional prosedur. Hal inilah yang mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau suatu kebijakan.

3. Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

a. Pengertian Program P2WKSS

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah selanjutnya disingkat P2WKSS, adalah peningkatan peranan perempuan yang diselenggarakan melalui serangkaian program, dengan menggunakan pola pendekatan lintas sektor dan lintas pelaku di daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas (Pasal 1 ayat 4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2009).

b. Sasaran dan Tujuan Program P2WKSS

Sasaran P2WKSS merupakan keluarga miskin di desa/kelurahan dengan perempuan sebagai penggerak utama.

Sedangkan pelaksanaan P2WKSS bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera (Permendagri No. 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan P2WKSS).

c. Jangkauan Program P2WKSS

Jangkauan program P2WKSS meliputi kelurahan dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota (Inayatin, 2012).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan khususnya di RW 08 Kelurahan Kurao Pagang. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik sampling insidental dan sampling purposive. Berdasarkan teknik sampling insidental yaitu beberapa warga binaan yang terdapat pada 75 KK yang peneliti temui secara kebetulan ada di lapangan penelitian, sedangkan pada sampling purposive yaitu Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Kasi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Ekonomi, Pembina Program P2WKSS dan Ketua Pelaksana Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data diawali dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program P2WKSS dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kurao Pagang

Program P2WKSS ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, yang berarti sehat secara

jasmani dan rohani serta sejahtera secara ekonomi, sosial, dan terbukanya akses menuju kehidupan yang lebih baik.

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan. Kebijakan publik yang tidak tercapai sesuai dengan tujuan karena mengalami resistensi, maka hal ini akan menjadi salah satu mengapa suatu kebijakan perlu dievaluasi, apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang harus diambil, apakah kebijakan itu harus dihentikan, dilakukan terminasi atau melaksanakan reformulasi untuk mendapatkan kebijakan baru (Muhiddin, 2017).

Berdasarkan hal tersebut untuk melihat evaluasi Program P2WKSS dalam pembinaan keluarga sejahtera di Kelurahan Kuraopagang dalam pelaksanaannya menurut William N. Dunn ada 6 indikator yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi, yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, kesamaan, ketanggapan dan ketepatangunaan, namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 indikator, yaitu :

## 1) Efektivitas

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan P2WKSS memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Dalam mewujudkan tujuan Program P2WKSS tersebut setiap proses dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah. Masalah yang ada tentu akan berdampak pada pencapaian tujuan.

Hal ini ditandai dengan kesulitan pemerintah untuk menggerakkan masyarakat dan

mengubah mindsetnya, produk yang belum laku dijual sehingga menyebabkan kekecewaan masyarakat pada pemerintah, selain itu komitmen yang terjadi di dalam keluarga juga membawa pengaruh tersendiri.

Program P2WKSS di Kelurahan Kuraopagang dalam pelaksanaannya sudah memberikan dampak positif bagi daerah, namun belum memberikan dampak pada perorangan. Terlihat dari tujuan Program P2WKSS yaitu untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera (PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2009), kondisi lingkungan masyarakat di Kelurahan Kuraopagang tepatnya pada RW 08 sudah "BERSERI" (bersih, sehat, rapi dan indah). Artinya tujuan keluarga sehat sudah mulai terwujud namun keluarga sejahtera belum terlihat.

Kemudian peneliti juga mendapati bahwa warga binaan masih belum mengetahui tentang apa itu Program P2WKSS, jika ditanyakan kepada warga binaan mereka mengatakan Program P2WKSS itu berupa pelatihan atau sosialisasi namun masih sebagian besar belum mengerti tentang arti dan maksud Program P2WKSS itu sendiri.

## 2) Kecukupan

Kecukupan merupakan suatu kemampuan yang dapat dilihat melalui modal, bahan baku, mesin yang digunakan dan sumberdaya manusia. Untuk mengetahui kemampuan tersebut dapat dilihat dari persepsi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program P2WKSS. Dinas P3AP2KB dan OPD terkait sudah dinilai maksimal melaksanakan tupoksinya pada Program P2WKSS, namun warga

binaan merasa belum cukup dalam memecahkan masalah kesejahteraan keluarga tepatnya untuk meningkatkan pendapatan di dalam keluarga. Hal ini diketahui dari keluhan yang dikatakan oleh warga binaan terkait modal, sumberdaya manusia dan pemasarannya.

### 3) Ketanggapan

Responsiviness atau ketanggapan melihat suatu kebijakan yang diterapkan dapat memuaskan seluruh kelompok kepentingan.

Dinas P3AP2KB sudah memberikan saran terkait permasalahan yang mungkin akan terjadi seperti mendirikan koperasi untuk modal, dan melaporkan produk ke kantor melalui ketua pelaksana untuk membantu pemasaran produk hasil kegiatan Program P2WKSS tetapi sejak dilakukan pelatihan warga binaan belum ada yang pernah ke kantor untuk melaporkan produknya. Salah satu yang menjadi alasan kenapa warga binaan belum melaporkan produknya ke kantor Dinas P3AP2KB dinilai dari kurangnya kejelasan kemana produk-produk pelatihan tersebut akan di jual. Kurangnya koordinasi di antara warga binaan kepada ketua pelaksana dan kepada Dinas P3AP2KB juga menjadi salah satu alasan kekecewaan warga binaan pada pelaksanaan program ini.

Dari pemaparan tersebut Program P2WKSS belum bisa memuaskan seluruh kelompok kepentingan terutama pada warga binaan karena warga binaan belum maksimal merasakan manfaat dari adanya program P2WKSS. Jadi dari indikator responsiviness yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan

bahwa Program P2WKSS belum memuaskan seluruh kelompok kepentingan karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan warga binaan.

## 2. Faktor – faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kurao Pagang

Suatu pelaksanaan program akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya, artinya keberhasilan Program P2WKSS tentu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George C. Edwards III dalam (Arifin, 2015) yaitu :

### 1) Faktor Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting yang berfungsi sebagai arah dalam melaksanakan suatu kegiatan. Instruksi yang di berikan dari atasan kepada pelaksana kebijakan haruslah jelas, tepat dan konsisten.

Komunikasi dan koordinasi yang terlaksana antara sesamapemerintah sudah berjalan dengan baik, komunikasi pemerintah dengan ketua pelaksana juga sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan saling mengkomunikasikan kegiatan melalui surat dan telfon. Selain itu komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat juga sudah terlaksana dengan baik. Terlihat dari ketua pelaksana yang cepat tanggap terhadap informasi dan mengkomunikasikannya langsung ke anggota warga binaan.

## 2) Faktor Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumberdaya manusia menjadi salah satu kendala dalam mencapai tujuan pelaksanaan Program P2WKSS yang ditandai dengan kesulitan pemerintah untuk mengajak dan mengubah mindset masyarakat. Selain itu ketidakjelasan dari segi modal dan pemasaran juga menjadi salah satu alasan yang menjadikan warga binaan mengeluhkan tentang manfaat dari program ini.

## 3) Faktor Sikap Pelaksana

Selain kapabilitas atau kemampuan pelaksana kebijakan juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dengan kata lain sikap lah yang mempengaruhi cara pandang pelaksana kebijakan tersebut dengan melihat dampaknya terhadap kepentingan perorangan maupun organisasi. Artinya pelaksana kebijakan memiliki prilaku-prilaku yang juga mempengaruhi suatu efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Program P2WKSS oleh pemerintah dan masyarakat sudah terlaksana dengan sikap yang baik. Artinya pemerintah dan masyarakat sudah bersikap baik agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

## 4) Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat di bandingkan membantu implementasi kebijakan.

Terdapat struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan Program P2WKSS terlihat dari adanya aturan jelas yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap kegiatan-kegiatan yang di serahi tugas dan tanggung jawab kepada Dinas P3AP2KB, yang kemudian di koordinasikan ke OPD-OPD terkait di Kota Padang dan disampaikan ke warga binaan melalui ketua pelaksana di daerah Program.

3. Upaya pemerintah pada pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kurao Pagang

Untuk dengan meminimalisir faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan Program P2WKSS ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu :

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dinas P3AP2KB berupaya mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang juga melibatkan OPD-OPD di Kota Padang sesuai tupoksinya agar masyarakat merasakan manfaat kehadiran dari adanya Program P2WKSS. Dinas P3AP2KB sudah memberi saran kepada ketua pelaksana di Kelurahan Kurao Pagang untuk mendirikan koperasi warga binaan untuk mengatasi masalah modal, sedangkan untuk masalah pemasaran Dinas P3AP2KB sudah bekerjasama dengan Dinas Perdagangan untuk mengatasi permasalahan terkait pemasaran produk hasil karya warga binaan. Selain itu Dinas P3AP2KB juga memberi arahan kepada warga binaan untuk melaporkan produk hasil karya mereka ke kantor Dinas P3AP2KB untuk dibantu pemasarannya.

2) Tindakan Promotif

Tindakan promotif merupakan yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dirinya dan lingkungannya yang mempengaruhi

pola hidup yang sehat.

Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dirinya dan lingkungannya dalam pola hidup yang sehat. Upaya yang telah dilakukan tersebut yaitu adanya penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti pengetahuan makanan sehat serta ancaman penyakit dari pola hidup yang tidak sehat yaitu makanan cepat saji dan sebagainya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kurao Pagang Kota Padang, setelah di evaluasi terlihat tidak berhasil. Hal ini diketahui melalui tiga indikator sebagai berikut :
  - a. Efektivitas suatu program dapat dilihat melalui kesesuaian pelaksanaannya dengan arah tujuan. Tujuan dari Program P2WKSS yaitu untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Pelaksanaan Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang sudah memberikan dampak positif bagi daerah, namun belum membawa dampak pada peningkatan pendapatan warga binaan.
  - b. Kecukupan merupakan suatu kemampuan yang dapat dilihat melalui modal, bahan baku, mesin yang digunakan dan sumberdaya manusia. warga binaan merasa Program P2WKSS belum cukup dalam memecahkan masalah kesejahteraan keluarga tepatnya untuk meningkatkan pendapatan di dalam keluarga. Hal ini



diketahui dari keluhan yang dikatakan oleh warga binaan terkait modal, sumberdaya manusia dan pemasarannya.

- c. Responsiviness atau ketanggapan melihat suatu kebijakan yang diterapkan dapat memuaskan seluruh kelompok kepentingan. Program P2WKSS belum memuaskan seluruh kelompok kepentingan karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan warga binaan terkait modal, sumber daya dan pemasaran produk.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Kurao Pagang Kota Padang sebagai berikut :
    - a. Komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten agar tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dalam pelaksanaan Program P2WKSS komunikasi dan koordinasi yang terlaksana antara sesama pemerintah sudah berjalan dengan baik, komunikasi pemerintah dengan ketua pelaksana juga sudah terjalin dengan baik. Selain itu komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat juga sudah terlaksana dengan baik.
    - b. Faktor sumber daya, sumberdaya manusia menjadi salah satu kendala dalam mencapai tujuan pelaksanaan Program P2WKSS yang ditandai dengan kesulitan pemerintah untuk mengajak dan mengubah mindset masyarakat. Selain itu ketidakjelasan dari segi modal dan pemasaran juga
- menjadi salah satu alasan yang menjadikan warga binaan mengeluhkan tentang manfaat dari program.
  - c. Faktor sikap pelaksana, pelaksanaan Program P2WKSS oleh pemerintah dan masyarakat sudah terlaksana dengan sikap yang baik.
  - d. Faktor struktur birokrasi, adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan Program P2WKSS yang terlihat dari adanya aturan jelas yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap kegiatan-kegiatan yang di serahi tugas dan tanggung jawab kepada Dinas P3AP2KB, yang kemudian di koordinasikan ke OPD-OPD terkait di Kota Padang dan disampaikan ke warga binaan melalui ketua pelaksana di daerah Program.
3. Upaya pemerintah pada pelaksanaan Program P2WKSS di Kelurahan Kurao Pagang dapat dilihat melalui tindakan preventif dan tindakan promotif. Pada tindakan preventif pemerintah mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang juga melibatkan OPD-OPD di Kota Padang sesuai tupoksinya, sedangkan pada tindakan promotif pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dirinya dan lingkungannya dalam pola hidup yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, T. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Deddy, M. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muhiddin, A. (2017). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabupaten Gowa)*.
- Niantyasari, A. (2018). *Evaluasi Sistem Informasi Manajemen di Bagian Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta*. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/60437/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah.

